

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Dampak Penerimaan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua

Along Timang Tandiboyong & Xaveria Indri Prasasyaningsih

Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

Email: indriprass@staff.ukdw.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of Local Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Special Autonomy Fund (OTSUS) on the Human Development Index (HDI) in ten districts in Papua Province during the period 2013-2022. Using the panel regression analysis method, this study explores the relationship between income variables and balancing fund allocations to improve the community's quality of life. The analysis results show that PAD and OTSUS Funds significantly impact the HDI, contributing positively to the quality of life through the implementation of effective local programs and special support provided to the regions. On the other hand, the DAU and DAK variables do not show a significant effect on the HDI. These findings emphasize the importance of efficiency in managing DAU and DAK to ensure optimal utilization of resources to achieve better human development goals. Therefore, it is recommended that further evaluation of the allocation of DAU and DAK is needed so that more effective strategies can be designed to improve the quality of life of the people of Papua Province. This study is expected to be a reference for policymakers in formulating more targeted programs.

Keywords Papua Province, Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Otonomi Khusus (OTSUS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pendahuluan

Provinsi Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menghadapi tantangan pembangunan yang sangat beragam. Meskipun menerima alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat, berbagai permasalahan sosial ekonomi masih menghantui daerah ini, termasuk rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, menjadi indikator penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Tingkat IPM yang rendah di Provinsi Papua menggambarkan kondisi yang memprihatinkan dan menunjukkan perlunya upaya serius dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, dana perimbangan yang disalurkan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi belum banyak penelitian yang secara mendalam menginvestigasi dampaknya terhadap peningkatan IPM di provinsi ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana dana perimbangan berkontribusi terhadap perbaikan IPM di Provinsi Papua, serta memahami mekanisme pengalokasian dana tersebut.

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Dalam konteks otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memainkan peran penting dalam mendukung penerapan kebijakan yang lebih mandiri bagi pemerintah daerah. PAD berasal dari aktivitas ekonomi lokal dan mencakup pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah. Dengan dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah. DAU yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mempercepat pembangunan, sementara DAK dirancang untuk memenuhi kebutuhan mendesak di daerah tertentu, termasuk di Papua. Keduanya memiliki potensi untuk meningkatkan IPM, namun tantangan dalam implementasinya, seperti efektivitas penggunaan dana dan transparansi, memerlukan analisis mendalam.

Dalam upaya pemerintah untuk menangani tantangan yang ada di Papua, Otonomi Khusus (Otsus) juga diterapkan sebagai kebijakan strategis. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. UU tersebut diperbarui dengan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Otsus memberikan kewenangan dan alokasi dana tambahan untuk mempercepat kemajuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua. Namun, meskipun ada berbagai kebijakan dan dana yang dialokasikan, hasil yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Sejarah panjang ketegangan politik dan konflik sosial di Papua menjadi salah satu faktor yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana berbagai bentuk dana dan kebijakan ini dapat dioptimalkan dalam mendukung peningkatan IPM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengambil kebijakan, serta kontribusi dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Papua, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan.

2. Tinjauan Literatur

Teori Rostow, yang dirumuskan oleh Walt Rostow, menggambarkan serangkaian tahapan dalam pembangunan ekonomi suatu masyarakat. Menurut teori ini, terdapat lima fase evolusi, mulai dari kondisi masyarakat tradisional hingga tahap konsumsi massal yang tinggi. Rostow meyakini bahwa setiap negara akan mengalami perkembangan melalui perkembangan melalui tahapan-tahapan tersebut dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kharisma et al., 2020). Teori Rostow menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di sebuah negara atau daerah melewati lima tahapan yaitu, Tahap Tradisional, Tahap Pra-syarat untuk Pertumbuhan, Tahap Pertumbuhan Laju Tinggi, Tahap Masa Kemakmuran yang Terus Menerus, dan Tahap Era Konsumsi Massal.

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Teori Rostow menyediakan panduan yang komprehensif untuk memahami dinamika pembangunan ekonomi melalui lima tahapan evolusi. Indikator perkembangan ekonomi yang relevan untuk setiap tahapan ini dapat membantu menganalisis dan mengevaluasi kemajuan suatu negara atau daerah. Pada Tahap Tradisional, indikator utama meliputi tingkat partisipasi tenaga kerja dalam sektor pertanian, prevalensi kemiskinan, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Di tahap ini, infrastruktur yang kurang berkembang dan rendahnya investasi membuat produktivitas tetap stagnan, sehingga pengukuran terhadap kualitas hidup dan tingkat pendidikan menjadi sangat penting. Memasuki Tahap Pra-syarat untuk Pertumbuhan, fokus beralih kepada peningkatan infrastruktur, akses terhadap teknologi, dan investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Indikator yang dapat digunakan meliputi angka investasi tetap, jumlah sekolah dan fasilitas kesehatan, serta peningkatan literasi. Di sini, negara mulai membangun fondasi untuk industrialisasi, yang menciptakan lapangan kerja baru dan memicu pertumbuhan ekonomi awal.

Pada Tahap Pertumbuhan Laju Tinggi, indikator seperti pertumbuhan PDB per kapita, laju urbanisasi, dan peningkatan kapasitas produksi industri menjadi sangat relevan. Pada titik ini, adopsi teknologi dan inovasi industri mendukung peningkatan produktivitas yang signifikan, dan dengan demikian, fokus pada ekspansi sektor manufaktur menjadi kunci. Selanjutnya, di Tahap Masa Kemakmuran yang Terus Menerus, indikator yang menggambarkan kesejahteraan sosial seperti tingkat pengangguran, distribusi pendapatan, dan akses terhadap layanan publik yang berkualitas menjadi penting. Dalam fase ini, masyarakat mulai menikmati hasil dari pertumbuhan yang berkelanjutan, di mana indikator kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur semakin membaik. Akhirnya, dalam Tahap Era Konsumsi Massal, indikator utama meliputi tingkat konsumsi per kapita, keberagaman produk yang tersedia, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Di tahap ini, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan keberagaman barang dan jasa mencerminkan masyarakat yang sejahtera dan konsumsi yang tinggi. Dengan demikian, pengukuran indikator-indikator ini berdasarkan teori Rostow tidak hanya memberikan wawasan tentang tahap perkembangan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi alat bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didefinisikan sebagai sebuah standar yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah. Pengukuran tersebut meliputi tiga aspek, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak (Ningrum, 2017). Menurut (Syofya, 2018) standar yang digunakan sebagai patokan pencapaian suatu daerah dalam pembangunan manusia disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk melihat ukuran pencapaian dalam pembangunan manusia terdapat tiga indikator yang diberlakukan, yaitu indikator kesehatan yang diukur dengan lama harapan hidup, indikator pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama waktu sekolah dan angka melek huruf, dan indikator ekonomi yang diukur dari kemampuan masyarakat mendapatkan barang yang diinginkan (Sumarsono & Novarinda, 2016). Penjelasan indikator-indikator yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai berikut:

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Perhitungan UHH melalui pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Tingkat Pendidikan diukur dari tingkat pendidikan seseorang. Indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Standar Hidup Layak Dari perspektif yang lebih luas, standar hidup layak mendeskripsikan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan komponen krusial dalam sistem keuangan daerah yang mencerminkan potensi ekonomi lokal, yang mencakup berbagai sumber pendapatan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dialokasikan secara terpisah, serta sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk memberikan kemandirian finansial bagi pemerintah daerah. Salah satu dasar hukum yang mengatur PAD adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan memaksimalkan potensi keuangan lokal demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien di daerah masing-masing. Pengelolaan PAD yang optimal sangat penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga setiap daerah dapat merancang dan melaksanakan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dengan meningkatkan kemampuan dalam memungut pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah dapat memperluas basis PAD-nya, yang pada gilirannya memungkinkan alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kontribusi dalam membayar pajak dan retribusi menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Melalui pendekatan yang inklusif dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat meningkat, sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Oleh karena itu, pemanfaatan PAD secara maksimal bukan hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan dalam memaksimalkan PAD sangat bergantung pada komitmen dan inovasi pemerintah daerah dalam menerapkan strategi-strategi yang tepat, serta kolaborasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah yang tepat, PAD dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah, yang memungkinkan daerah untuk mencapai kemandirian dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah.

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

2.3 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu komponen penting dalam sistem transfer pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan utama untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, sehingga dapat membiayai kebutuhan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi yang berlaku. DAU berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar daerah, terutama dalam konteks keuangan yang bervariasi di seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan dana ini sangat krusial, karena diharapkan dapat mengoptimalkan belanja pemerintah daerah yang berfokus pada peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program sosial yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan alokasi DAU yang tepat, diharapkan kemandirian daerah dapat meningkat, mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan lain yang mungkin kurang stabil. Selain itu, kebijakan DAU merupakan langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan fiskal antar daerah, mengingat bahwa tidak semua daerah memiliki potensi dan struktur fiskal yang sama, yang sering dikenal sebagai horizontal fiscal imbalance. Dalam konteks ini, penentuan jumlah dana yang akan dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sangat bergantung pada kebutuhan spesifik masing-masing daerah, yang diukur melalui berbagai indikator. Pemberian DAU memprioritaskan penyamaan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan potensi daerah tersebut, seperti luas wilayah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Dengan demikian, daerah yang memiliki tantangan geografi tertentu atau populasi yang lebih besar akan mendapatkan perhatian lebih dalam alokasi dana, untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya dengan efektif. Penentuan alokasi DAU ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat menciptakan kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan bahwa penggunaan dana ini dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, pengelolaan dan penggunaan DAU yang baik diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan DAU secara efektif, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan inovasi dalam pemanfaatan dana ini, dengan mengedepankan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan peluang-peluang baru dalam pengembangan ekonomi lokal. Dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki rencana strategis yang jelas dalam menggunakan DAU, dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan DAU perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, untuk memastikan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, dapat tercapai secara optimal. (Pradana dkk., 2023).

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

2.4 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu instrumen keuangan penting yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah tertentu dengan tujuan yang sangat spesifik, sehingga dana ini tidak dapat digunakan secara sembarangan. DAK dirancang untuk mendukung pendanaan pada kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan juga sejalan dengan prioritas nasional. Dengan demikian, DAK tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan daerah yang sesuai dengan agenda nasional. Pengalokasian DAK dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk penentuan kesenjangan fiskal (fiscal grant), yang bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam kapasitas fiskal antar daerah; alokasi berdasarkan biaya per unit (unit cost grant), yang mengacu pada estimasi biaya yang diperlukan untuk penyediaan layanan publik tertentu; serta skema pinjaman yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan fasilitas publik oleh pemerintah daerah, yang mencakup dana jangka menengah dan jangka panjang (capitalization grant). Selain itu, DAK juga dapat berupa subsidi, yang merupakan persentase dari pinjaman yang ditanggung oleh pemerintah pusat dalam pembangunan fasilitas publik yang dikelola melalui utang oleh pemerintah daerah (subsidised loan). Secara garis besar, DAK dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Fisik disalurkan untuk pendanaan kegiatan yang bersifat fisik dan merupakan prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Alokasi DAK Fisik memiliki tujuan untuk memastikan ketercapaian output dan outcome, berupa penyediaan fasilitas pelayanan publik yang memadai, dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, DAK Nonfisik berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat untuk memperoleh layanan publik yang berkualitas dan memenuhi standar pelayanan minimum dengan harga yang terjangkau. Melalui DAK Nonfisik, pemerintah pusat berupaya mendukung program-program yang berorientasi pada penguatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, sehingga dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih baik dan efektif. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan DAK harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, agar setiap dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan program yang terintegrasi dan terarah dalam penggunaan DAK, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah serta prioritas nasional yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dalam perencanaan dan evaluasi program yang didanai melalui DAK. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan penggunaan DAK dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, serta memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, DAK merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung desentralisasi dan pemerataan pembangunan, yang memungkinkan setiap daerah untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dengan cara yang lebih terarah dan berbasis pada kebutuhan lokal (Nashshar & Mulyana, 2022).

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

2.5 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah dana yang sangat penting dan dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus di daerah tertentu, dengan fokus utama pada Provinsi Papua, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, serta berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana otonomi khusus ini menjadi komponen vital dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berasal dari dana Transfer ke Daerah (TKD), dan memiliki tujuan yang jelas untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dalam konteks ini, otonomi khusus bagi Provinsi Papua berarti pemberian wewenang yang lebih luas kepada pemerintah provinsi dan masyarakat Papua untuk mengatur dan mengurus daerah mereka sendiri, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya otonomi khusus ini, diharapkan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memanfaatkan dana yang diberikan untuk memajukan dan mensejahterakan seluruh masyarakat Papua, yang selama ini mengalami berbagai tantangan dalam aspek pembangunan ekonomi dan sosial. Pemberian dana Otsus ini bukan hanya sekadar penyaluran dana, tetapi juga merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kemajuan yang nyata bagi masyarakat Papua. Dalam pelaksanaannya, dana Otsus harus digunakan secara efisien dan efektif, dengan fokus pada program-program yang dapat langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satu tujuan utama dari pemberian dana Otsus adalah untuk menciptakan kesetaraan dan keseimbangan pembangunan antara Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, mengingat bahwa Papua memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merumuskan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana Otsus, agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata dari program-program yang dijalankan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan dana Otsus juga sangat penting, agar mereka dapat merancang dan melaksanakan program-program yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap penggunaan dana Otsus juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau ketidakefektifan dalam penggunaan dana. Dengan demikian, dana Otsus diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan. Secara keseluruhan, keberadaan Dana Otonomi Khusus merupakan langkah strategis dalam mewujudkan cita-cita otonomi daerah yang lebih baik, sehingga Provinsi Papua dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dan berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

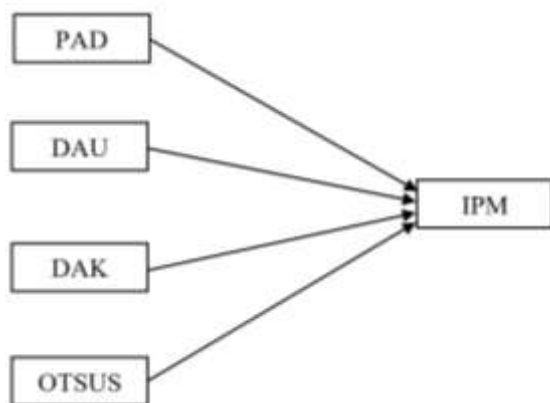
Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Berikut adalah bentuk kerangka pemikiran pada penelitian *Dampak Penerimaan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di Provinsi Papua* yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen:

Gambar 1. Model Penelitian



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam mengumpulkan pendapatan dari sumber-sumber lokal. Pendapatan ini sangat penting untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang esensial. Dengan peningkatan PAD, pemerintah daerah akan lebih mandiri dalam pengambilan keputusan fiskal dan alokasi anggaran, yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Keterkaitan antara peningkatan PAD dan perbaikan IPM menunjukkan bahwa daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan lokalnya cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

H1: Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana dari pemerintah pusat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan umum pemerintah daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Dengan alokasi DAU yang memadai, pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan dasar seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang semuanya merupakan komponen krusial dari IPM. Peningkatan DAU diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pengembangan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan IPM di Provinsi Papua.

H2: Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Alokasi Khusus (DAK) dirancang untuk mendanai proyek-proyek spesifik yang menjadi prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. DAK

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

berfungsi untuk mengatasi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh anggaran daerah. Dengan adanya DAK, pemerintah daerah dapat melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang strategis dan memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan IPM.

H3: Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua.

Pengaruh Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Otonomi Khusus (Otsus) diberikan kepada Provinsi Papua sebagai bentuk pengakuan atas status otonomi dan untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan di daerah tersebut. Dana Otsus digunakan untuk program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan khusus masyarakat Papua, seperti peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan fokus pada program-program yang tepat, Otsus diharapkan dapat mempercepat pembangunan manusia dan meningkatkan IPM di Provinsi Papua.

H4: Dana Otonomi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua.

3. Metode Penelitian

Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua, penelitian ini memerlukan data yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Otonomi Khusus (OTSUS), serta IPM itu sendiri. Sumber data utama berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyediakan informasi tahunan mengenai IPM dan indikator terkait lainnya. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Papua juga menjadi sumber penting, menawarkan rincian mengenai alokasi dan penggunaan dana perimbangan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan kombinasi data panel yang mencakup data silang (cross-section) dari 29 kabupaten di Provinsi Papua, dengan fokus pada 10 kabupaten yang representatif, dan laporan data dari periode 2013 hingga 2022. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber resmi, seperti BPS dan laporan pemerintah daerah, penelitian ini bertujuan untuk memastikan validitas dan reliabilitas analisis yang dilakukan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi panel, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan dinamis antara variabel-variabel tersebut dan dampaknya terhadap IPM. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana dana perimbangan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di Provinsi Papua.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa variabel yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua, dengan acuan pada teori Rostow mengenai tahapan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti signifikan terhadap IPM. Hasil ini sejalan dengan teori

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Rostow, yang menekankan pentingnya akumulasi modal dalam proses pertumbuhan ekonomi. PAD yang tinggi mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi secara efektif untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan PAD berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong IPM.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sebaliknya, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada DAU sebagai sumber pendanaan dapat menghambat kemandirian ekonomi daerah. Dalam konteks teori Rostow, ketergantungan yang berlebihan pada DAU dapat membatasi akumulasi modal dan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. DAU yang tidak dikelola secara optimal bisa mengakibatkan kurangnya insentif untuk pengembangan sumber daya lokal, yang esensial bagi kemajuan jangka panjang.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Ini mungkin disebabkan oleh kurang fokusnya dalam alokasi dana pada sektor-sektor kunci yang mendorong pertumbuhan. Teori Rostow menggarisbawahi pentingnya investasi yang terarah dalam sektor-sektor yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Jika DAK tidak difokuskan pada pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang relevan, maka dampaknya terhadap IPM akan minimal. Selain itu, ketergantungan pada DAK dapat menghambat pengembangan kapasitas lokal untuk mengelola sumber daya secara mandiri.

Pengaruh Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sebaliknya, variabel Otonomi Khusus (OTSUS) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IPM. OTSUS memberikan daerah kekuasaan lebih besar dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks teori Rostow, OTSUS dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengizinkan daerah untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih responsif terhadap karakteristik sosial dan ekonomi mereka. Hal ini menciptakan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pencapaian IPM yang lebih baik. Tabel 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.181.090	5.769.447	-0.204715	0.8383
LOGPAD	0.148271	0.053625	2.764.936	0.0071
LOGDAU	0.948372	1.763.773	0.537695	0.5924
LOGDAK	-0.224307	0.155764	-1.440.045	0.1540
LOGOTSUS	0.730517	0.222347	3.285.481	0.0015

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan pentingnya mengoptimalkan sumber daya lokal dan memperkuat otonomi daerah dalam meningkatkan IPM di Provinsi Papua. Kombinasi strategi yang memfokuskan pada pengembangan PAD dan pengelolaan OTSUS yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

5. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian menunjukkan variabel PAD dan OTSUS signifikan terhadap IPM, sementara DAU dan DAK tidak menunjukkan signifikansi, dapat disimpulkan bahwa Propinsi Papua menghadapi dinamika pembangunan ekonomi yang relevan dengan teori Rostow. Papua sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, memiliki peluang atau potensi yang besar untuk mencapai tahapan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sesuai dengan teori Rostow. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD yang tinggi, sebagai indikator pendapatan lokal yang kuat, memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan IPM. Hal ini sejalan dengan *Tahap Pertumbuhan Laju Tinggi* yang dianjurkan oleh Rostow, di mana akumulasi modal lokal menjadi krusial untuk membangun infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Tidak signifikansi pada DAU dan DAK menunjukkan bahwa alokasi dana dari pemerintah pusat atau sumber daya eksternal belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pembangunan manusia di Papua. Hal ini menyoroti tantangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan secara efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, seperti yang ditekankan oleh teori Rostow. Dalam konteks ini, Papua dapat mengambil pelajaran penting untuk mengembangkan strategi pembangunan yang lebih berfokus pada penguatan PAD dan pemanfaatan OTSUS secara efektif. Investasi yang tepat dalam infrastruktur, pendidikan, dan Kesehatan, yang didukung oleh pendapatan lokal yang lebih tinggi dan kontrol yang lebih besar terhadap kebijakan lokal melalui OTSUS, dapat menjadi kunci untuk mencapai tahap pertumbuhan yang lebih maju sesuai dengan teori Rostow. Secara keseluruhan Papua memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi regionalnya dengan memanfaatkan sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial dan kebijakan publik. Dengan demikian implementasi kebijakan yang tepat dan strategi pembangunan yang berbasis pada kondisi lokal akan membantu Papua mencapai tahap-tahap pertumbuhan yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sejalan dengan prinsip-prinsip teori Rostow

Referensi

- Annafie, K., & Nurmandi, A. (2016). Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 304–338. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0061>
- Arafat, L., Rindayati, W., Kabupaten Pulang Pisau, B., Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen, D., & Pertanian Bogor, I. (n.d.). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah* (Vol. 7, Issue 2). *Jurnalku+67+revisi*. (n.d.).
- Kharisma, V. D., Samputra, P. L., & Muntaha, P. Z. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua. *Journal Publicuho*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11392>

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Matematika, J., Sains, F., Teknologi, D., Gunung, S., & Bandung, D. (n.d.). *Analisis Dampak Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat Terhadap IPM Analysis of the Impact of Papua and West Papua Special Autonomy Funds on IPM Fahrudin Muhtarulloh* (Vol. 6, Issue 1).

Melmambessy, D., Manajemen, D. P., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Numbay, P. (n.d.). *JURNAL EKONOMI & BISNIS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura*.

Perbendaharaan, J., Negara, K., Publik, D. K., Nashshar, M. I., Keuangan, P., Stan, N., Id, J. B. A., & Korespondensi, A. (n.d.). *Indonesian Treasury Review Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi Budi Mulyana*.

Rahmawati, N., Kusuma Prasetyanto, P., Sari Islami, F., Pembangunan, E., & Tidar, U. (n.d.). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Minimum Regional (Umr), Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia). Convergence : The Journal Of Economic Development, 4(1)*.

Sanur, D. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 11(1)*, 65–83. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)